

# WHITEPAPER

## Indonesia di Persimpangan Ekonomi

*Ketika Visi Bertabrakan dengan Realita — Analisis Krisis Struktural 2024–2025*



Oleh: Eisenhower Rockefeller  
CEO Eisen Group  
Mei 2026



---

## PROFIL PENULIS

Eisenhower Rockefeller adalah pengusaha ekspor B2B Indonesia yang aktif membangun dan mengoperasikan beberapa bisnis berbasis komoditas dan energi secara langsung. Ia adalah CEO Eisen Group, grup usaha yang mencakup Pinator Energy — perusahaan ekspor wood pellet ke pasar Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok untuk kebutuhan pembangkit listrik — serta Savya Charcoal, yang bergerak di bidang ekspor arang dan sedang mengembangkan lini activated carbon. Di luar sektor energi biomassa, Eisenhower juga aktif dalam ekspor seafood ke pasar Timur Tengah, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan.

Perspektif yang dituangkan dalam whitepaper ini lahir dari pengalaman operasional nyata di lapangan: negosiasi kontrak buyer B2B lintas negara, manajemen supply chain komoditas ekspor, proses kurasi mitra produksi, dan navigasi regulasi perdagangan internasional. Sebagai praktisi yang benar-benar menjalankan bisnis — bukan sekadar membicarakannya — ia melihat secara langsung distorsi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan yang lahir tanpa pemahaman mendalam terhadap realita operasional di lapangan.

Whitepaper ini bukan seruan dari pengamat luar. Ini adalah pernyataan dari seseorang yang setiap harinya berhadapan dengan realita membangun bisnis ekspor dari Indonesia — dengan segala kompleksitas, kegagalan, dan keberhasilannya — dan meyakini bahwa kebijakan ekonomi Indonesia harus dibangun di atas fondasi pemahaman yang nyata terhadap ekosistem bisnis yang sesungguhnya, bukan asumsi di atas kertas.



---

## KATA PENGANTAR

Kita hidup di era di mana data ekonomi makro dan angka pertumbuhan nasional selalu tersedia — dan selalu terlihat lebih baik dari yang dirasakan di lapangan. PDB tumbuh. Inflasi terkendali di angka resmi. Investasi masuk. Tapi di saat yang sama, nelayan tidak bisa melaut karena solar terlalu mahal. Pabrik-pabrik tutup satu per satu. Klaim JHT melonjak. Perusahaan-perusahaan asing pergi tanpa banyak penjelasan.

Saya menulis whitepaper ini sebagai praktisi ekspor B2B yang setiap harinya berhadapan langsung dengan realita tersebut. Saya tahu betapa berbedanya angka di laporan pemerintah dengan keputusan yang harus dibuat di lapangan — perbedaan antara proyeksi makro yang optimis dan kenyataan ketika biaya operasional melampaui kemampuan bertahan pelaku usaha nyata.

Yang saya khawatirkan bukan bahwa pemerintah tidak punya visi. Visinya ada, dan secara konseptual tidak selalu salah. Yang saya khawatirkan adalah gap yang terus melebar antara visi tersebut dan realita eksekusinya — gap yang tumbuh subur karena laporan yang sampai ke atas sudah disaring, karena kebijakan dibuat oleh mereka yang tidak cukup dekat dengan lapangan, dan karena ketidakpastian regulasi yang kronis membuat semua kalkulasi bisnis jangka panjang menjadi mustahil.

Indonesia punya sumber daya yang cukup untuk menjadi negara yang jauh lebih sejahtera. Yang kurang bukan potensinya — yang kurang adalah kejujuran dalam membaca sinyal, keberanian dalam mengakui kegagalan kebijakan, dan kemauan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Selama ketiga hal itu belum terpenuhi, pertumbuhan yang kita banggakan akan terus rapuh di atas fondasi yang retak.

Whitepaper ini adalah pernyataan, sekaligus undangan untuk melihat krisis struktural ini dengan lebih jujur dan lebih serius.



---

## EXECUTIVE SUMMARY

---

*Indonesia tengah menghadapi krisis yang tidak terlihat di permukaan namun sangat nyata dalam dampaknya: erosi struktural yang terjadi diam-diam di balik angka makro yang terlihat hijau. Rupiah yang terus tertekan, investor yang pergi tanpa pengumuman, nelayan yang tidak lagi bisa melaut, buruh yang mencairkan JHT mereka karena tidak ada pilihan lain. Ini bukan resesi nasional yang dramatis — ini kematian ekonomi lokal yang berlangsung sektoral, regional, dan sunyi.*

---

Whitepaper ini berargumen bahwa krisis yang dihadapi Indonesia bersifat struktural — bukan siklus yang akan pulih sendiri. Ia mengakar pada lemahnya kualitas institusi, ketidakpastian kebijakan yang kronis, dan gap yang terus melebar antara visi kepemimpinan dan kapasitas eksekusi di lapangan.



ICOR Indonesia di kisaran 6–7 — hampir dua kali lipat kompetitor regional seperti Vietnam dan Thailand — menunjukkan bahwa setiap rupiah investasi tidak menghasilkan output yang sepadan akibat institusi yang lemah dan biaya ketidakpastian yang tinggi.



Defisit fiskal yang tidak produktif: pendapatan negara naik 10,5% YoY namun belanja naik 31,4%, dengan fiscal multiplier yang rendah — belanja besar yang tidak menghasilkan kapasitas produktif jangka panjang.



Eksodus modal berkualitas: perusahaan Jepang dan Korea hengkang bukan karena upah, tapi karena biaya ketidakpastian regulasi yang terlalu tinggi. FDI yang masuk makin didominasi enclave investment yang tidak mentransfer teknologi maupun menyerap tenaga kerja lokal secara bermakna.



Krisis sektor riil yang tersembunyi: solar industri Rp 28.000–30.000 di daerah menciptakan cost-push inflation yang tidak tertangkap CPI resmi, menghancurkan margin sektor maritim, pertanian, dan manufaktur secara bersamaan.



Efek domino piramida ekonomi: tekanan di level korporasi mengalir ke bawah melalui rantai vendor, UMKM, buruh, hingga komunitas lokal. Klaim JHT yang melonjak adalah sinyal real-time yang tidak bisa dimanipulasi — jauh lebih jujur dari angka pengangguran resmi BPS.

Analisis ini menggunakan multi-framework teoritis yang saling melengkapi: Institutional Economics (Acemoglu, North) sebagai backbone, Hayekian Economics untuk membedah distorsi intervensi dan matinya ekonomi lokal organik, Regime Uncertainty (Higgs) untuk menjelaskan eksodus investor, Keynesian Economics sebagai alat kritik terhadap defisit yang tidak produktif, dan Weberian Analysis untuk membedah kegagalan birokrasi patrimonial.

Kesimpulan whitepaper ini bukan prediksi kehancuran — melainkan peringatan berbasis data bahwa trajektori yang ada saat ini tidak berkelanjutan. Indonesia masih punya waktu dan kapasitas untuk berubah arah. Tapi itu membutuhkan kejujuran dalam membaca sinyal, keberanian mengakui kegagalan kebijakan, dan kemauan untuk menempatkan domain expert di posisi-posisi kunci yang menentukan masa depan ekonomi bangsa.

---

---

# PENDAHULUAN

[ LENSA TEORITIS: ADAM SMITH — WEALTH OF NATIONS ]

---

Adam Smith, dalam *Wealth of Nations* (1776), menegaskan bahwa kemakmuran sebuah bangsa tidak ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan bangsa tersebut mengorganisasi kerja, modal, dan institusinya untuk mengkonversi sumber daya menjadi output yang produktif. Dengan standar ini, Indonesia hari ini sedang gagal — bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena mesin konversinya rusak dari dalam.

Whitepaper ini bukan dokumen pesimisme. Ini adalah peringatan berbasis data. Krisis yang sedang berlangsung di Indonesia tidak datang dalam bentuk dramatis — tidak ada bank yang kolaps, tidak ada demonstrasi besar di jalan. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih berbahaya: erosi yang lambat, sistemik, dan diam-diam. Rupiah yang terus tertekan. Investor yang pergi tanpa pengumuman. Nelayan yang tidak lagi bisa melaut karena solar sudah tidak terjangkau. Pekerja yang mencairkan JHT mereka karena tidak ada pilihan lain. Kota-kota kecil yang ekonominya mati satu per satu.

Analisis ini menggunakan multi-framework teoritis — bukan karena tidak ada jawaban tunggal, tapi karena krisis struktural membutuhkan lebih dari satu lensa untuk dilihat secara utuh. Kerangka yang digunakan:

Teori / Tokoh	Digunakan di	Untuk Menjelaskan
Institutional Economics (Acemoglu, North)	Backbone keseluruhan	Rule of law, property rights, why nations fail — institusi lemah = negara gagal
Hayekian Economics (Friedrich Hayek)	Bab 2 & 5	Knowledge problem, distorsi intervensi, matinya ekonomi lokal organik
Regime Uncertainty (Robert Higgs)	Bab 2 & 3	Ketidakpastian kebijakan lebih merusak dari pajak tinggi — investor hengkang
Keynesian Economics (sebagai kritik)	Bab 1	Defisit fiskal yang tidak produktif — belanja besar tanpa fiscal multiplier yang memadai
Weberian Analysis (Max Weber)	Bab 2	Patrimonial vs rational-legal bureaucracy — kabinet berbasis loyalitas vs kompetensi
Wealth of Nations (Adam Smith)	Pembuka & Penutup	Pasar butuh kebebasan dan kepastian kontrak — invisible hand yang dihancurkan negara

Urutan logika argumentasi dalam whitepaper ini mengalir dari Smith ke Weber ke Hayek ke Higgs ke Acemoglu — membangun kasus bahwa Indonesia memiliki semua gejala kegagalan institusional secara bersamaan, dan bahwa tanpa perubahan struktural yang nyata, trajektori yang ada saat ini tidak berkelanjutan.

---

# 1

## FONDASI YANG RETAK

### Tekanan Makroekonomi Indonesia

[ *Lensa Teoritis: Keynesian Economics (sebagai kritik) — Institutional Economics (North, Acemoglu)* ]

#### 1.1 Rupiah dan Kelemahan Struktural

Pelempahan rupiah yang terjadi belakangan ini sering dinarasikan sebagai dampak eksternal semata — agresivitas kebijakan suku bunga The Fed, penguatan indeks dolar (DXY), dan ketidakpastian geopolitik global. Narasi ini tidak salah, tapi tidak lengkap. Di balik tekanan eksternal tersebut, terdapat kelemahan struktural domestik yang sudah lama dibiarkan: current account deficit yang persisten, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan rendahnya daya tarik investasi jangka panjang.

Ketika rupiah melemah, efeknya menyebar ke seluruh lapisan rantai produksi. Importir bahan baku membayar lebih mahal. Utang luar negeri korporasi swasta dalam denominasi dolar membengkak dalam nilai rupiah. Biaya energi yang sebagian komponennya mengikuti harga internasional ikut terkerek. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar — ia merambat ke vendor, supplier, buruh, hingga pedagang kecil di pasar.

#### 1.2 ICOR: Cermin Inefisiensi yang Tidak Bisa Disembunyikan

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah salah satu indikator paling jujur tentang kesehatan ekonomi jangka panjang. ICOR mengukur berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output — semakin rendah, semakin efisien.

Negara	ICOR	Interpretasi
Indonesia	6 - 7	Inefisiensi tinggi
Vietnam	4 - 5	Kompetitif
Thailand	4 - 5	Kompetitif
China	3 - 4	Sangat Efisien

Indonesia berada di kisaran ICOR 6–7. Artinya, dibutuhkan investasi 6–7 rupiah untuk menghasilkan tambahan output 1 rupiah. Dalam kerangka Institutional Economics, ICOR yang tinggi adalah simtom langsung dari institusi yang lemah: setiap rupiah investasi harus berjuang melewati lapisan ketidakpastian, inefisiensi birokrasi, dan rent-seeking sebelum bisa menghasilkan nilai nyata.

### 1.3 Defisit Fiskal yang Tidak Produktif

Pendapatan negara naik 10,5% YoY, namun belanja negara naik 31,4% — menghasilkan defisit yang besar. Dalam kerangka Keynesian, defisit fiskal bisa dibenarkan jika fiscal multiplier-nya tinggi: setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan lebih dari satu rupiah aktivitas ekonomi. Tapi defisit Indonesia tidak memenuhi syarat ini.

Belanja yang membengkak lebih banyak terserap ke belanja pegawai, proyek mercusuar tanpa dampak produktivitas yang jelas, dan program yang tidak membangun kapasitas jangka panjang. Ini bukan stimulus Keynesian yang berhasil — ini pemborosan fiskal yang menggunakan justifikasi Keynesian tanpa mengikuti logikanya. Keynes sendiri tidak pernah membenarkan defisit yang tidak menghasilkan output.

**Argumen Inti:** Angka makro Indonesia terlihat hijau di permukaan — PDB tumbuh, inflasi terkontrol di angka resmi. Tapi di bawah permukaan, fondasinya sudah bocor. ICOR yang tinggi, defisit yang tidak produktif, dan rupiah yang tertekan secara struktural adalah tanda bahwa pertumbuhan yang ada bukan pertumbuhan yang sehat — melainkan pertumbuhan yang dipinjam dari masa depan.



---

## 2

# NEGARA YANG TIDAK BISA DIPEGANG KATA-KATANYA

## Kegagalan Kebijakan Sistemik

[Lensa Teoritis: Hayekian Economics — Weberian Analysis — Regime Uncertainty (Robert Higgs)]

### 2.1 Regime Uncertainty: Penyakit yang Lebih Merusak dari Pajak Tinggi

Robert Higgs, dalam studinya tentang mengapa investasi kolaps selama Great Depression Amerika, menemukan sesuatu yang kontraintuitif: bukan hanya pajak tinggi atau regulasi berat yang membunuh investasi — melainkan ketidakpastian kebijakan itu sendiri. Investor dan pengusaha tidak butuh kebijakan yang sempurna. Mereka butuh kebijakan yang bisa diprediksi dan dipegang.

Indonesia memiliki pola regime uncertainty yang kronis dan berulang. Perubahan aturan TKDN yang mendadak membuat industri elektronik dan otomotif panik di tengah jalan. Regulasi ekspor mineral yang dibalik membatalkan kontrak jangka panjang dengan buyer asing yang sudah ditandatangani. Kebijakan solar subsidi yang dikotak-katik tanpa solusi pengganti menghancurkan kalkulasi operasional nelayan, petani, dan pelaku industri kecil. Setiap perubahan regulasi dapat menghapus investasi yang sudah berjalan, mengacaukan proyeksi bisnis, dan perlahan mengikis kepercayaan pasar.

### 2.2 Visi yang Benar, Eksekusi yang Timpang

Ada nuansa penting yang harus disampaikan dengan jujur: visi besar Presiden soal hilirisasi, kedaulatan energi, dan pemerataan ekonomi secara konseptual tidak salah arah. Masalahnya terletak sepenuhnya di lapisan eksekusi.

Di antara arahan di puncak dan realita di lapangan, terdapat gap informasi yang sistemik dan berbahaya. Fenomena Asal Bapak Senang (ABS) — kultur birokrasi di mana laporan yang naik ke atas sudah disaring dan diperindah, kehilangan fakta keras yang tidak nyaman — membuat pengambil keputusan tertinggi bertindak berdasarkan data yang sudah di-filter. Hayek memperingatkan hal ini lewat konsep knowledge problem: tidak ada satu pun entitas — termasuk pemerintah — yang bisa mengumpulkan semua informasi yang tersebar di seluruh perekonomian. Ketika keputusan dibuat seolah informasi itu tersedia lengkap, distorsi adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari.

---

---

## 2.3 Kabinet dan Problem Kompetensi Domain

Max Weber membedakan dua model birokrasi yang berbeda secara fundamental. Pertama, patrimonial bureaucracy: posisi diisi berdasarkan loyalitas personal dan kedekatan politik. Kedua, rational-legal bureaucracy: posisi diisi berdasarkan kompetensi, meritokrasi, dan aturan yang transparan. Weber menunjukkan bahwa kapitalisme modern hanya bisa tumbuh di atas fondasi birokrasi tipe kedua.

Ketika posisi-posisi kunci kabinet lebih mempertimbangkan keseimbangan politik daripada domain expertise, keputusan teknis dibuat tanpa pemahaman teknis yang memadai. Regulasi yang dihasilkan tidak workable di lapangan. Target yang ditetapkan tidak realistis. Dan ketika implementasi gagal, yang disalahkan adalah pelaksana di bawah — bukan desain kebijakannya. Korea Selatan di era Park Chung-hee dan China di era reformasi Deng Xiaoping berhasil keluar dari jebakan kemiskinan justru karena menempatkan technocrat dan praktisi di posisi kunci kebijakan ekonomi, bukan politisi.

## 2.4 Satgas PKH: Studi Kasus Kebijakan Tanpa Resolusi

Penyitaan lahan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) adalah demonstrasi paling konkret dari apa yang terjadi ketika visi yang legitimate bertemu dengan eksekusi yang tidak kompeten. Visi redistribusi dan penertiban lahan secara prinsip bisa dibenarkan. Tapi ketika eksekusi dilakukan tanpa ahli tata kelola agraria, tanpa mekanisme resolusi hukum yang jelas, dan tanpa rencana pengelolaan pasca-penyitaan — hasilnya adalah double destruction tanpa penciptaan nilai.

Lahan disita, aktivitas ekonomi di atasnya berhenti, komunitas yang bergantung pada ekosistem bisnis di sekitar lahan kehilangan mata pencaharian — tapi lahan yang disita terbengkalai tanpa pengelolaan yang produktif. Ini bukan redistribusi aset. Ini destruksi kapital. Dan ia menciptakan chilling effect yang lebih luas: pengusaha lain yang melihat ini menjadi takut berinvestasi di sektor land-based — perkebunan, pertambangan, properti — sehingga modal parkir ke instrumen finansial yang tidak menciptakan lapangan kerja.

**Argumen Inti:** Masalah Indonesia bukan hanya kebijakan yang salah — tapi ketidakmampuan negara menyediakan kepastian dan resolusi. Selama ABS tetap menjadi kultur, laporan yang sampai ke puncak akan terus menyenangkan, bukan jujur. Dan selama posisi kunci diisi bukan berdasarkan kompetensi domain, gap antara visi dan realita akan terus melebar.

---

---

# 3

## EKSODUS MODAL

### Runtuhnya Kepercayaan Investor

[ *Lensa Teoritis: Regime Uncertainty (Higgs) — Institutional Economics (Acemoglu, North)* ]

#### 3.1 Mengapa Investor Pergi

Henggangnya perusahaan-perusahaan Jepang dan Korea dari Indonesia sering disederhanakan sebagai soal upah yang naik. Ini keliru. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak pergi karena buruh Indonesia terlalu mahal — mereka pergi karena biaya ketidakpastian terlalu tinggi. Vietnam dan Thailand menawarkan hal yang sama atau lebih baik bukan karena upahnya lebih murah, tapi karena investment treaty protection-nya lebih kredibel, rule of law-nya lebih konsisten, dan regulasinya lebih bisa dipegang.

Douglass North menunjukkan bahwa transaction costs — biaya negosiasi, biaya penegakan kontrak, biaya ketidakpastian hukum — adalah penentu utama apakah sebuah ekonomi bisa menarik investasi jangka panjang. Ketika transaction costs terlalu tinggi karena institusi yang lemah, modal akan mengalir ke tempat yang lebih rendah biaya ketidakpastiannya. Indonesia kalah bukan di faktor produksi — tapi di faktor institusi.

#### 3.2 Degradasi Kualitas FDI

Yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar jumlah FDI yang masuk, tapi kualitasnya. FDI yang masuk ke Indonesia saat ini makin didominasi oleh enclave investment — mayoritas dari China — yang karakternya berbeda secara fundamental dari investasi Jepang atau Korea yang lama. Enclave investment tidak mentransfer teknologi secara bermakna, tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal, dan tidak membangun ekosistem industri yang bisa berdiri sendiri.

Sementara itu, Indonesia makin bergantung pada hot money — investasi portofolio di instrumen pasar modal dan obligasi — bukan FDI jangka panjang. Hot money masuk cepat dan keluar lebih cepat lagi ketika sentimen global berubah. Negara yang bergantung pada hot money untuk menutup current account deficit-nya adalah negara yang selalu satu langkah dari krisis neraca pembayaran.

#### 3.3 Deindustrialisasi Prematur

Share manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun — dan ini terjadi sebelum Indonesia menjadi negara kaya. Ini adalah jebakan yang disebut para ekonom sebagai premature deindustrialization: negara kehilangan mesin pertumbuhan manufakturnya sebelum sempat memanen manfaat penuh dari industrialisasi. Korea Selatan, Taiwan, dan China melewati fase ini dengan mempertahankan dan memperluas sektor manufaktur mereka jauh lebih lama. Indonesia tampaknya akan melewatkan jendela sejarah tersebut.

---

# 4

## KRISIS DI SEKTOR RIIL

### Ketika Biaya Operasional Melampaui Kemampuan Bertahan

[ *Lensa Teoritis: Hayekian Economics — Institutional Economics* ]

#### 4.1 Solar Industri dan Cost-Push Inflation yang Tersembunyi

Harga solar industri di daerah-daerah terpencil kini menyentuh Rp 28.000–30.000 per liter. Bagi nelayan, harga di lapangan bahkan mencapai Rp 30.000. Angka ini bukan sekadar kenaikan harga bahan bakar biasa — ini adalah representasi dari cost-push inflation yang tidak tertangkap dengan baik oleh angka CPI resmi.

Inflasi yang diukur BPS berbasis pada keranjang konsumsi perkotaan yang tidak merefleksikan secara penuh realita biaya operasional sektor maritim dan pertanian di daerah. Ketika harga solar naik 40–60%, nelayan tidak punya pilihan: mereka menanggung kerugian, mengurangi frekuensi melaut, atau berhenti sama sekali. Hayek mengingatkan bahwa harga adalah sinyal informasi paling efisien dalam ekonomi — dan ketika sinyal itu terdistorsi oleh intervensi yang tidak konsisten, seluruh rantai produksi mengalami disorientasi.

#### 4.2 Dampak Berlapis ke Sektor Maritim

Bagi armada kapal nelayan skala menengah, biaya solar bisa menyumbang 50–70% dari total biaya operasional per trip. Ketika solar naik ke Rp 30.000, margin per trip berubah dari tipis menjadi negatif. Konsekuensinya berjenjang: kapal tidak berangkat, tangkapan ikan turun, supply pasar menurun, harga ikan di konsumen naik, dan inflasi pangan bergulir — terutama di daerah pesisir yang bergantung pada ikan sebagai protein utama. Ini adalah siklus inflasi yang dimulai dari kebijakan energi yang tidak konsisten, dan berakhir di piring makan masyarakat kelas bawah.

#### 4.3 Manufaktur dan UMKM: Terjepit dari Dua Sisi

Sektor manufaktur menghadapi tekanan ganda yang datang bersamaan: rupiah yang lemah membuat bahan baku impor lebih mahal, sementara biaya energi yang naik meningkatkan ongkos produksi. Korporasi yang bisa bertahan melakukan efisiensi — yang artinya PHK, pengurangan order ke vendor, dan penundaan ekspansi.

UMKM yang berorientasi ekspor berada dalam posisi yang ironis: secara teori, rupiah yang lemah seharusnya menguntungkan eksportir karena nilai penerimaan dalam dolar menjadi lebih besar dalam rupiah. Tapi kenaikan biaya produksi terjadi lebih cepat dari kenaikan nilai ekspor. Margin tetap tergerus, bahkan dalam kondisi rupiah yang seharusnya berpihak pada mereka.

**Argumen Inti:** Sektor riil sedang mengalami tekanan yang tidak terlihat di angka agregat nasional. PDB tumbuh 5% di atas kertas, tapi di lapangan, banyak pelaku ekonomi di sektor maritim, manufaktur, dan pertanian sudah tidak bisa bernapas. Krisis ini tidak dramatis — tapi sangat nyata bagi mereka yang mengalaminya.

# 5

## PIRAMIDA YANG RUNTUH

### Efek Domino dan Matinya Ekonomi Lokal

[ Lensa Teoritis: Hayekian Economics — Institutional Economics — Keynesian (sebagai kritik) ]

#### 5.1 Mekanisme Domino: Dari Korporasi ke Komunitas

Ketika korporasi di puncak piramida ekonomi terguncang, efeknya tidak berhenti di sana. Ia mengalir ke bawah melalui rantai yang panjang dan saling terhubung — menghancurkan setiap lapisan yang dilewatinya. Ini bukan metafora. Ini mekanisme yang bisa dilacak secara empiris.

1	Korporasi tertekan oleh biaya energi, rupiah lemah, dan ketidakpastian regulasi
2	Korporasi cut vendor, kurangi order, tunda ekspansi
3	UMKM dan supplier tier-2/3 kehilangan kontrak — langsung tidak ada pemasukan
4	Buruh di-PHK — klaim JHT melonjak sebagai sinyal nyata skala PHK
5	Daya beli lokal kolaps — warung, toko, jasa lokal sepi dan tutup
6	Pajak daerah turun — Pemda tidak punya anggaran untuk layanan publik
7	Infrastruktur dan layanan publik memburuk — makin tidak menarik bagi investor baru
8	Lingkaran setan: tidak ada investasi baru → ekonomi lokal mati total

#### 5.2 PHK dan Klaim JHT: Indikator yang Tidak Bisa Dimanipulasi

Angka pengangguran resmi BPS memiliki kelemahan struktural yang sudah lama diketahui: definisi 'bekerja' yang digunakan adalah minimal satu jam dalam seminggu. Dengan definisi ini, seseorang yang bekerja serabutan satu jam per minggu dihitung sebagai pekerja — dan tidak masuk ke angka pengangguran. Akibatnya, skala masalah ketenagakerjaan yang sebenarnya tersembunyi di balik angka resmi yang terlihat baik-baik saja.

Data klaim Jaminan Hari Tua (JHT) adalah antidot dari kelemahan ini. JHT adalah dana yang dikumpulkan pekerja selama bertahun-tahun sebagai cadangan masa depan. Orang tidak akan mencairkan tabungan pensiun mereka kecuali dalam kondisi benar-benar terpaksa — ketika tidak ada lagi pilihan penghasilan lain. Lonjakan klaim JHT adalah sinyal real-time yang keras dan tidak bisa dimanipulasi: ini bukan data survei, ini transaksi nyata.

Jika rata-rata satu pekerja menanggung 3–4 anggota keluarga, maka setiap klaim JHT merepresentasikan satu keluarga yang kehilangan sumber penghasilan utamanya. Kalikan angka klaim dengan faktor tanggungan tersebut, dan gambaran skala dampak sosial yang sesungguhnya mulai terlihat — jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.

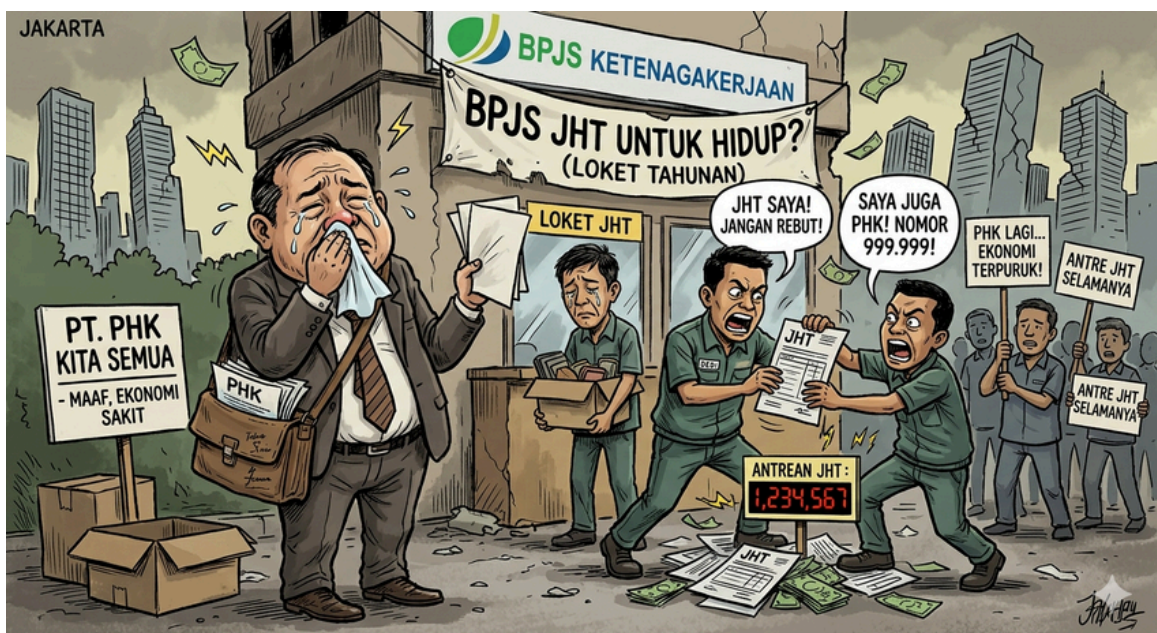
### 5.3 Ekonomi Sektoral dan Lokal yang Mati dalam Kesunyian

Kematian ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia tidak seragam. PDB nasional mungkin masih terlihat tumbuh 5% — tapi agregat nasional menyembunyikan kematian yang terjadi di level sektoral dan regional. Kota-kota yang bergantung pada satu sektor industri adalah yang paling rentan: kota tekstil, kota tambang, kota nelayan.

Ketika pabrik tekstil tutup karena tidak sanggup bersaing, bukan hanya buruh pabrik yang kehilangan penghasilan. Warung makan di sekitar kawasan industri kehilangan pelanggan. Kontrakan kehilangan penyewa. Toko kelontong kehilangan pembeli. Ekosistem ekonomi lokal yang dibangun selama puluhan tahun runtuh dalam hitungan bulan. Dan tidak ada mekanisme penggantian yang datang dari atas.

Kasus Satgas PKH memperparah ini: lahan disita tapi terbengkalai, ekosistem bisnis di sekitarnya ikut mati, komunitas lokal kehilangan mata pencaharian tanpa ada substitusi. Hayek menyebut ekosistem ekonomi lokal yang tumbuh organik sebagai spontaneous order — tatanan yang muncul bukan karena direncanakan, tapi karena ribuan individu berinteraksi dan saling menyesuaikan diri selama bertahun-tahun. Menghancurkan spontaneous order jauh lebih mudah dari membangunnya kembali.

**Argumen Inti:** Indonesia tidak sedang mengalami resesi nasional yang seragam dan dramatis. Yang terjadi adalah kematian ekonomi lokal yang berlangsung diam-diam di ratusan kota kecil dan sektor-sektor tertentu — sementara angka PDB nasional masih terlihat hijau. Silent recession ini lebih berbahaya justru karena tidak terlihat hingga kerusakannya sudah terlalu dalam.



---

# 6

## DI PERSIMPANGAN

### Peringatan, Bukan Ramalan

[ *Lensa Teoritis: Semua kerangka — sintesis akhir* ]

#### 6.1 Semua Sinyal Merujuk ke Arah yang Sama

Whitepaper ini telah menelusuri enam dimensi krisis yang berbeda — makroekonomi, kegagalan kebijakan, eksodus modal, tekanan sektor riil, dan efek domino sosial. Tidak ada satu pun dari dimensi ini yang berdiri sendiri. Mereka saling memperkuat dan mempercepat satu sama lain dalam spiral yang, jika dibiarkan, akan semakin sulit diputus.

ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa setiap rupiah investasi tidak menghasilkan output yang sepadan — karena institusi yang lemah menaikkan biaya transaksi. Klaim JHT yang melonjak menunjukkan bahwa skala PHK jauh lebih besar dari yang dilaporkan resmi. FDI berkualitas yang keluar menunjukkan bahwa kepercayaan investor jangka panjang sudah erosi. Defisit fiskal yang tidak produktif menunjukkan bahwa negara membelanjakan lebih banyak tapi menghasilkan lebih sedikit. Dan semua ini bermuara pada satu tempat yang sama: rakyat di lapisan paling bawah piramida, yang tidak punya buffer untuk menghadapi tekanan yang datang dari segala arah.

#### 6.2 Yang Perlu Berubah

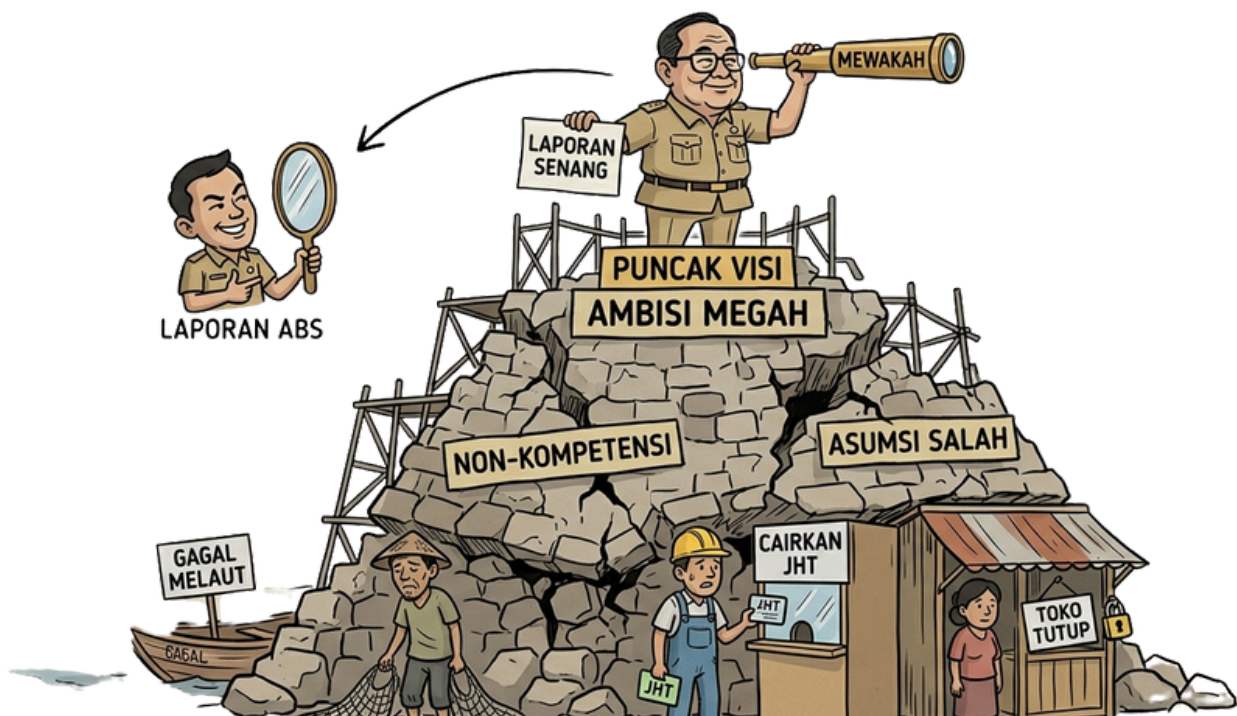
Perubahan yang dibutuhkan bukan revolusi — tapi koreksi struktural yang jujur dan berani. Beberapa hal yang paling mendesak:

- **Kepastian Hukum:** Kepastian hukum yang nyata, bukan sekadar di atas kertas. Investor tidak butuh kebijakan sempurna — mereka butuh konsistensi yang bisa dipegang. Kasus arbitrase internasional yang tidak dieksekusi harus diselesaikan. Aturan yang sudah ditetapkan harus dihormati.
  - **Kebijakan Energi:** Kebijakan energi yang tidak skizofren. Tidak bisa secara bersamaan mengklaim visi transisi energi sambil membiarkan harga solar industri tidak terkontrol di lapangan dan membunuh sektor maritim dan pertanian.
  - **Komposisi Kabinet:** Kabinet yang diisi oleh praktisi dan domain expert, bukan semata pertimbangan keseimbangan politik. Untuk mengeksekusi visi sebesar hilirisasi dan kedaulatan energi, dibutuhkan menteri yang benar-benar paham substansi bidangnya.
  - **Kultur Birokrasi:** Mekanisme pelaporan yang jujur ke atas. ABS harus dihancurkan secara kultural sebelum bisa dihancurkan secara struktural. Presiden membutuhkan data yang jujur, bukan data yang menyenangkan.
  - **Kebijakan Berbasis Resolusi:** Setiap kebijakan yang menyita, merelokasi, atau mendistribusikan aset harus datang bersama rencana resolusi yang konkret — bukan menyusul setelah kerusakan sudah terjadi.
-

## PENUTUP

Masalah Indonesia bukan kekurangan visi — tapi kelebihan ambisi tanpa infrastruktur eksekusi yang memadai. Selama laporan yang sampai ke puncak adalah laporan yang menyenangkan bukan yang jujur, kebijakan akan terus lahir dari asumsi yang salah. Selama posisi-posisi kunci diisi bukan berdasarkan kompetensi domain, gap antara visi dan realita akan terus melebar. Dan yang selalu menanggung biayanya adalah mereka yang ada di lapisan paling bawah piramida — nelayan yang tidak bisa melaut, buruh yang mencairkan JHT-nya, dan pedagang kecil yang satu per satu menutup tokonya.

Indonesia **masih punya waktu** untuk berubah arah. Tapi jendela itu tidak akan terbuka selamanya. Bangsa yang tidak mau belajar dari sinyal-sinyalnya sendiri tidak bisa berharap pada hasil yang berbeda.



---

## DAFTAR REFERENSI

*(Disusun untuk mendukung analisis makroekonomi, kebijakan fiskal, investasi, sektor riil, dan perbandingan kebijakan publik dalam dokumen ini)*

### **Sumber Data Nasional**

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia; Laporan Pertumbuhan Ekonomi; Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)* (berbagai edisi). Jakarta: BPS.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Laporan APBN; Nota Keuangan dan Rancangan APBN* (berbagai tahun). Jakarta: Kemenkeu.

Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia; Statistik Neraca Pembayaran; Laporan Kebijakan Moneter* (berbagai edisi). Jakarta: BI.

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Laporan Realisasi Investasi; Statistik FDI Indonesia* (berbagai tahun). Jakarta: BKPM/BKPM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Harga Bahan Bakar Minyak; Kebijakan Subsidi Energi* (berbagai tahun). Jakarta: KESDM.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Laporan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT); Statistik Ketenagakerjaan* (berbagai edisi). Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Data Pemutusan Hubungan Kerja; Laporan Pasar Kerja Nasional* (berbagai tahun). Jakarta: Kemenaker.

### **Sumber Data & Lembaga Internasional**

World Bank. *World Development Indicators; Ease of Doing Business Index; Indonesia Economic Prospects* (berbagai edisi). Washington D.C.: World Bank.

International Monetary Fund. *Article IV Consultation — Indonesia; World Economic Outlook* (berbagai edisi). Washington D.C.: IMF.

---

---

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *World Investment Report* (berbagai edisi). Geneva: UNCTAD.

World Justice Project. *Rule of Law Index* (berbagai edisi). Washington D.C.: WJP.

Asian Development Bank. *Asian Development Outlook; Key Indicators for Asia and the Pacific* (berbagai edisi). Manila: ADB.

Japan External Trade Organization (JETRO). *Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and Oceania* (berbagai tahun). Tokyo: JETRO.

### **Referensi Akademis & Teoritis**

Acemoglu, Daron & Robinson, James A. *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers, 2012.

North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Hayek, Friedrich A. "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review*, Vol. 35, No. 4, 1945.

Hayek, Friedrich A. *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press, 1944.

Higgs, Robert. "Regime Uncertainty: Why the Great Depression Lasted So Long and Why Prosperity Resumed after the War." *The Independent Review*, Vol. 1, No. 4, 1997.

Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Rodrik, Dani. *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W.W. Norton & Company, 2011.

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

---

---

## GLOSSARY

- **ABS (Asal Bapak Senang):** Kultur birokrasi di mana laporan yang naik ke atas sudah disaring dan diperindah — memutus realita lapangan dari pengambilan keputusan.
  - **Capital Flight:** Perpindahan modal keluar dari suatu negara akibat erosi kepercayaan investor.
  - **Chilling Effect:** Efek penghambatan investasi yang timbul dari ketidakpastian kebijakan, bukan larangan langsung.
  - **Cost-Push Inflation:** Inflasi akibat kenaikan biaya produksi — bukan peningkatan permintaan.
  - **Current Account Deficit:** Nilai impor melebihi ekspor secara persisten — menekan nilai tukar secara struktural.
  - **Enclave Investment:** Investasi asing yang tidak mentransfer teknologi dan tidak menyerap tenaga kerja lokal.
  - **Fiscal Multiplier:** Seberapa besar aktivitas ekonomi yang dihasilkan per unit belanja pemerintah.
  - **Hot Money:** Investasi portofolio jangka pendek yang masuk dan keluar mengikuti sentimen global.
  - **ICOR:** Berapa banyak investasi untuk menghasilkan satu unit output — semakin tinggi, semakin inefisien.
  - **Knowledge Problem:** Konsep Hayek — informasi ekonomi bersifat lokal dan tersebar, tidak bisa dikuasai pemerintah sepenuhnya.
  - **Middle Income Trap:** Negara terjebak pada pendapatan menengah dan gagal bertransisi menjadi negara maju.
  - **Patrimonial Bureaucracy:** Posisi birokrasi diisi berdasarkan loyalitas, bukan kompetensi.
  - **Regime Uncertainty:** Konsep Higgs — ketidakpastian arah kebijakan lebih merusak dari pajak tinggi sekalipun.
  - **Rent-Seeking:** Mencari keuntungan lewat manipulasi regulasi, bukan penciptaan nilai produktif.
  - **Silent Recession:** Kontraksi ekonomi sektoral yang tidak tertangkap angka PDB nasional.
  - **Spontaneous Order:** Konsep Hayek — tatanan ekonomi organik yang tumbuh dari interaksi individu, bukan perencanaan pusat.
  - **Transaction Costs:** Biaya ketidakpastian dalam transaksi ekonomi — indikator kualitas institusi suatu negara.
-

---

# THE FINAL VISION

## "Fondasi Sebelum Ambisi — Data Sebelum Narasi"

Whitepaper ini bukan sekadar kritik terhadap kebijakan yang gagal atau angka yang tidak jujur. Ini adalah seruan untuk membangun standar yang lebih tinggi — bagi pembuat kebijakan yang memegang kepercayaan publik, bagi birokrat yang menyampaikan laporan ke atas, bagi investor yang masih percaya pada potensi Indonesia, dan bagi setiap pelaku usaha yang setiap harinya berjuang membangun sesuatu yang nyata di tengah ekosistem yang tidak selalu berpihak.

Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya: pasar domestik terbesar keempat di dunia, sumber daya alam yang belum sepenuhnya diolah dengan cerdas, dan populasi muda yang produktif. Yang kurang bukan potensinya. Yang kurang adalah kejujuran institusional — kemampuan sebuah sistem untuk melihat dirinya sendiri apa adanya, mengakui kegagalannya, dan mengkoreksi arahnya sebelum kerusakan menjadi terlalu dalam untuk diperbaiki.

Selama laporan yang naik ke puncak adalah laporan yang menyenangkan, selama posisi kunci diisi bukan berdasarkan kompetensi domain, dan selama ketidakpastian kebijakan dibiarkan menjadi norma — potensi itu akan terus terkubur di bawah ambisi yang lebih besar dari kapasitas eksekusinya.

“

"Negara yang tidak mau jujur kepada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa jujur kepada rakyatnya. Dan negara yang tidak jujur kepada rakyatnya tidak layak mendapat kepercayaan investornya. Indonesia punya waktu — tapi jendela itu tidak terbuka selamanya. Bangun fondasinya dulu. Baru bangun gedungnya." — **Eisenhower Rockefeller**





[WWW.EISENHOLDING.COM](http://WWW.EISENHOLDING.COM)

